

Strategi Komunikasi Pemberdayaan Sri Sultan Hamengku Buwono IX Dalam Pembangunan Selokan Mataram: Sebuah Tinjauan Historis

Pamuji Raharjo¹, Sugiyanto², Tanti Apriyani³ Samsuharjo⁴, Suindartini⁵

^{1,3,4,5}Universitas Gunung Kidul

²Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Corresponding author: sukmaaji@gmail.com

Abstrak

Pembangunan Selokan Mataram pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) bukan sekadar proyek infrastruktur fisik, melainkan sebuah manifestasi dari komunikasi pemberdayaan yang brilian. Penelitian ini menganalisis bagaimana Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) IX menggunakan strategi komunikasi ganda dan diplomasi ke atas kepada pemerintah kolonial Jepang dan komunikasi pemberdayaan ke bawah kepada rakyat Yogyakarta untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman kerja paksa (*romusha*). Pendekatan dan desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode sejarah. Metode sejarah dipilih karena objek material penelitian ini adalah peristiwa masa lampau, yakni dinamika sosial-politik dan pembangunan Selokan Mataram pada masa pendudukan Jepang 1942-1945. Pendekatan kualitatif digunakan untuk membedah makna, motif, dan strategi di balik pesan-pesan yang dikomunikasikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada pemerintah kolonial dan rakyat Yogyakarta, teknik pengumpulan data dengan *library research*, validasi data dengan teknik kritik sumber (verifikasi) dan triangulasi data, teknik analisa data melalui tahapan interpretasi historis yang dipadukan dengan analisis teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pendekatan komunikasi pemberdayaan, Sri Sultan HB IX berhasil mengubah posisi rakyat dari calon korban eksploitasi menjadi subjek pembangunan yang bekerja untuk kesejahteraan agraris tanah mereka sendiri. *Outcome* dan *impact* dari komunikasi pemberdayaan lahan kering berubah subur sehingga cadangan pangan masyarakat dapat tercukupi.

Kata kunci: komunikasi pemberdayaan; Sri Sultan Hamengkubuwono IX; Selokan Mataram; pendudukan Jepang; Yogyakarta.

Abstract

The construction of the Mataram Canal during the Japanese occupation (1942–1945) was not merely a physical infrastructure project but a brilliant manifestation of empowerment communication. This study analyzes how Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) IX employed a dual communication strategy utilizing upward diplomacy with the Japanese colonial government and downward empowerment communication with the people of Yogyakarta to save the community from the threat of forced labor (romusha). The study employs a descriptive qualitative approach utilizing the historical method. The historical method was selected because the research subject concerns past events: specifically, the socio-political dynamics and the construction of the Mataram Canal during the 1942–1945 Japanese occupation. A qualitative approach was used to examine the meanings, motives, and strategies behind

the messages conveyed by Sri Sultan Hamengkubuwono IX to both the colonial government and the people of Yogyakarta. Data collection involved library research; validation was achieved through source criticism (verification) and triangulation; and data analysis proceeded through historical interpretation combined with text analysis. The findings demonstrate that, through an empowerment communication approach, Sri Sultan HB IX successfully transformed the people from potential victims of exploitation into active agents of development, working for the agricultural prosperity of their own land. The outcome and impact of this empowerment communication resulted in the transformation of dry land into fertile terrain, thereby ensuring sufficient food reserves for the community.

Keywords: *empowerment communication; Sri Sultan Hamengkubuwono IX; Mataram Canal; Japanese occupation; Yogyakarta.*

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga menyangkut proses bagaimana gagasan, kepentingan, pengetahuan, dan keputusan pembangunan dikomunikasikan kepada masyarakat. Pada masa penjajahan Jepang, praktek komunikasi pemberdayaan telah dipraktikkan oleh Raja Mataram Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX dalam berbagai aktivitas sebagai raja maupun sebagai pahlawan pejuang kemerdekaan RI. Sikap dan kebijakan Sri Sultan HB IX dalam membela dan melindungi rakyat tampak pada masa penjajahan Jepang di Indonesia khususnya bagi masyarakat Yogyakarta. Bukti kuat implementasi komunikasi pemberdayaan Sri Sultan HB IX tercermin dalam proses pembangunan Selokan Mataram dari Sungai Progo di Kabupaten Kulon Progo perbatasan dengan Kabupaten Magelang sampai di Sungai Opak di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman (Roem, 2011).

Komunikasi pemberdayaan masyarakat berkembang dalam kajian komunikasi pembangunan, seiring berkembangnya paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor dan subjek pembangunan. Paradigma tersebut mengkritisi pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down*, yang cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek penerima program. Dalam pembangunan Selokan Mataram, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menguat beriringan dengan kesadaran masyarakat untuk mengambil peran lebih pada setiap aspek pembangunan. Pembangunan Selokan Mataram pada masa itu merupakan upaya pembangunan yang memberdayakan masyarakat yang berbasis komunitas merupakan bagian dari strategi untuk mengembangkan, merekonstruksi serta memperbaiki struktur masyarakat agar lebih berdaya (La Patilaya et al., 2022). Disinilah Sri Sultan HB IX telah mengawali pembangunan berbasis manusia menjadi alternatif pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat, khususnya para petani.

Komunikasi dipandang tidak hanya sebagai sarana untuk menyampaikan pesan pembangunan, tetapi sebagai proses membangun dialog, kesadaran, partisipasi, kapasitas, dan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Dengan perspektif tersebut, komunikasi pemberdayaan dapat digunakan untuk melihat bagaimana komunikasi digunakan oleh aktor dalam hal ini Sultan sebagai Sebagai Raja Kasultanan Yogyakarta sekaligus tokoh perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, dengan kharisma dan ketokohnya (Ratmanto,

2012), menciptakan perubahan posisi masyarakat, dari objek menjadi subjek yang memiliki peran dalam menentukan dan memperoleh manfaat dari pembangunan. Atas hal di atas sesungguhnya pembangunan berbasis manusia atau dikenal dengan pembangunan berbasis masyarakat yang saat ini sedang digalakan bukan konsep baru, tetapi merupakan reposisi, sebab sudah diawali oleh Sri Sultan HB IX pada tahun 1944.

Berpijak pemikiran dan pernyataan Aubrey Fisher (1986), bahwa setiap proses pembangunan tidak ada persoalan dari waktu ke waktu yang tidak melibatkan aspek komunikasi, termasuk keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Komunikasi menjadi aspek sentral dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dalam perkembangan dan fleksibilitasnya komunikasi menjadi bagian yang terpenting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (Fisher et al., 1986). oleh karena itu paper ini hadir untuk mencoba memberikan informasi sejarah mengenai konsep komunikasi pemberdayaan yang telah dilakukan Sri Sultan HB IX, khususnya berkaitan dengan pembangunan Selokan Mataram pada masa penjajahan Jepang, sebuah proses pembangunan atas hasil negosiasi dengan pihak penjajah (Jendral Simazu Yoshiro), demi keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya.

Yogyakarta pada masa penjajahan Jepang merupakan wilayah pertanian yang gersang dan minim hasil pertanian. Pengairan lahan pertanian di masa itu hanya mengandalkan air hujan karena minimnya sumber air alami. Maret 1942, Jepang menduduki Kota Yogyakarta dan mengibarkan bendera propaganda kemerdekaan bagi masyarakat. Aksi propaganda diteruskan dengan membunuh tentara dan para petinggi Belanda yang ada di Yogyakarta (Kurasawa, 1993). Sri Sultan HB IX mencium gelagat Jepang yang berencana menjadikan masyarakat Yogyakarta sebagai Romusha. Romusha adalah program Jepang dalam memaksa rakyat agar mau bekerja sebagai buruh atau pekerja kasar lainnya di proyek-proyek militer yang digagas penjajah Jepang (Apid, 2008). Sri Sultan HB IX langsung mengambil sikap dengan mengajukan tawaran untuk meyakinkan Jepang membangun sistem pengairan yang berguna sebagai sistem pertahanan dan sumber air Jepang dalam perang sehingga masyarakat tidak dikirim ke luar Yogyakarta sebagai Romusha.

Tawaran Sri Sultan HB IX ternyata diterima Jepang dan Jepang sepakat membangun saluran irigasi tersebut dan memerintahkan rakyat membangun selokan dengan panjang 30,8 kilometer. Dalam konteks ini menggambarkan kemampuan diplomasi Sultan Hamengku Buwono IX dalam melindungi kepentingan penduduk setempat selama masa pendudukan (Anggratyas, 2025). Selokan Mataram kemudian dibangun tahun 1944, setelah selesai dibangun saluran ini diberinama Kanal Yoshiro oleh Jepang. Nama tersebut berasal dari Jendral Simazu Yoshiro di masa Sengoku, maksud dari penamaan tersebut adalah meskipun luas badan kanal ini kecil, tapi ia memiliki peran yang besar. Pasca kepergian Jepang, Sultan mengganti nama kanal Yoshiro menjadi Selokan Mataram (<https://tirtoadisid.slemankab.go.id>). Maksud dari penggantian ini sebagai pengingat bahwa Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia khususnya di DI Yogyakarta. Saluran irigasi ini berfungsi mengairi sawah dan ladang para petani yang berada di DI Yogyakarta, terutama bagian utara sehingga sawah-sawah yang memerlukan pasokan air dapat teraliri air dari saluran tersebut. Sebelum dibangunnya Selokan Mataram, Yogyakarta adalah daerah yang kering, hasil bumi terbatas dan kebanyakan berupa singkong yang diolah menjadi gaplek. Kerangka komunikasi pemberdayaan menyediakan ruang yang spesifik dengan menghubungkan komunikasi pada aspek partisipasi, kapasitas, kedudukan subjek, akses sumber daya, serta dampak pembangunan. Dalam ruang tersebut memungkinkan terjadinya komunikasi dalam dua tingkatan yang berkaitan: diplomasi politik kepada pemerintah Jepang demi memperoleh izin proyek saluran air, dan komunikasi publik kepada masyarakat guna mengarahkan keterlibatan mereka dalam pembangunan berbasis kebutuhan agraris.

Selokan Mataram menjadi kasus historis yang relevan untuk menguji fungsi komunikasi sebagai alat pemberdayaan di era kolonial. Dampak pembangunannya tidak terbatas pada fisiknya sebagai saluran air, tetapi juga mengubah kedudukan sosial masyarakat—terutama melalui pengalihan potensi mobilisasi perang Jepang menjadi pembangunan agraris yang bermanfaat bagi warga. Perspektif komunikasi pemberdayaan di sini ditempatkan sebagai kerangka analitis kontemporer guna menelaah praktik komunikasi historis tersebut, tanpa mengklaim bahwa istilah tersebut telah digunakan secara sadar oleh Sri Sultan HB IX pada zamannya.

Literatur mengenai Selokan Mataram umumnya berfokus pada aspek sejarah pendudukan Jepang, strategi Sri Sultan HB IX, irigasi, pencegahan *romusha*, dan relasi kuasa, seperti penggunaan teori akses untuk membedah perebutan pengaruh antara Sultan dan Jepang. Meski menyediakan fondasi sejarah yang solid, studi-studi tersebut belum mengeksplorasi fungsi komunikasi yang menghubungkan diplomasi, pembangunan, partisipasi warga, dan pemberdayaan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis pembangunan Selokan Mataram melalui perspektif komunikasi pemberdayaan. Fokus kajian mencakup strategi komunikasi Sri Sultan HB IX terhadap pemerintah Jepang, hubungannya dengan partisipasi masyarakat, serta pergeseran kedudukan warga dari objek eksploitasi menjadi subjek pembangunan. Tanpa bermaksud melakukan anakronisme, mengingat konsep komunikasi pemberdayaan baru lahir belakangan, penelitian ini bertujuan menunjukkan bahwa esensi praktik komunikasi pemberdayaan sebenarnya telah tercermin dalam dinamika historis masyarakat Yogyakarta pada era tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode sejarah (historis). Metode sejarah dipilih karena objek material penelitian ini adalah peristiwa masa lampau, yakni dinamika sosial-politik dan pembangunan Selokan Mataram pada masa pendudukan Jepang (1942-1945). Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk membedah makna, motif, dan strategi di balik pesan-pesan yang dikomunikasikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada pemerintah kolonial dan rakyat Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data (heuristik), data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) atau heuristik, yakni tahapan mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah serta literatur yang relevan. Sumber data terbagi menjadi dua: a) Sumber primer: literatur yang memuat kesaksian pelaku sejarah atau dokumen yang dekat dengan peristiwa, seperti buku *Takhta untuk Rakyat* (Roem, 2011) yang mendokumentasikan pemikiran dan langkah taktis Sri Sultan HB IX secara langsung; b) Sumber sekunder: buku teks sejarah, jurnal ilmiah, dan literatur kajian komunikasi yang relevan, seperti catatan sejarah pendudukan Jepang di Yogyakarta (Suhartono, 2010), serta buku-buku teori komunikasi pemberdayaan

Validitas data, untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik kritik sumber (verifikasi) dan triangulasi data. Data yang diperoleh dari satu literatur sejarah dikonfirmasi dan dibandingkan dengan literatur sejarah lainnya guna menghindari bias interpretasi (Zed, 2025) sehingga diperoleh fakta historis yang utuh mengenai ancaman *romusha* dan alasan pembangunan Selokan Mataram

Teknik analisis data, analisis data dilakukan melalui tahapan interpretasi historis yang dipadukan dengan analisis teks (wacana). Fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi kemudian dianalisis menggunakan teori komunikasi pemberdayaan, advokasi, dan pembedahan makna

(*framing*). Tahapan akhir dari analisis ini adalah historiografi, yaitu merangkai dan menuliskan kembali fakta-fakta sejarah tersebut ke dalam sebuah narasi akademis yang sistematis, logis, dan analitis untuk menjawab bagaimana strategi komunikasi tersebut menyelamatkan rakyat Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menemukan bentuk komunikasi pemberdayaan dan berbagai strategi komunikasi yang dijalankan Sri Sultan HB IX, pada bagian pembahasan ini akan diawali dengan informasi sejarah Selokan Van Der Wijk. Selokan Van Der Wijk sepanjang 17 km dibangun tahun 1909-1932 masa kepemimpinan Sri Sultan HB VIII. Selokan Van Der Wijk dibangun di wilayah Kecamatan Minggir dan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman dan Kecamatan Sedaya Kabupaten Bantul. Pembangunan Selokan Van Der Wijk bertujuan untuk mengairi lahan tebu seluas kurang lebih 20 hektar yang terdapat di Kecamatan Minggir, Moyudan dan Sedayu. Tebu hasil pertanian tersebut untuk menyuplai pabrik gula di Yogyakarta, sebab pada masa Belanda di Yogyakarta telah dibangun 17 pabrik gula. Nama selokan Van der Wijk diambil dari nama Gubernur Jenderal Belanda, bernama Jonkheer Carel Herman Aart van der Wijk.

Beberapa keunikan Selokan Van Der Wijk antara lain konstruksi mengandalkan gravitasi bumi, terdapat satu bagian yang aliran airnya berada lebih tinggi dari jalan raya dan area persawawah. Area ini dinamakan Buk Renteng, Buk Renteng merupakan saluran air dengan ketinggian bervariasi, di bawahnya terdapat lorong-lorong yang saling menyambung, bahkan ada satu bagian yang di bawahnya bisa dilewati mobil dan motor. Selepas Buk Renteng, terdapat sebuah talang tembaga melintasi di atas sungai.



Gambar1: Selokan Mataram

Sumber: Jaka Suryanta/Getty Images, diunduh Sabtu 5 September 2026, pukul 12.00 wib.

Berpijak dari keunikan Selokan Van Der Wijk karya Sri Sultan HB VIII dan pernyataan Sunan Kalijaga, “bahwa rakyat Yogyakarta dapat makmur apabila ada aliran sungai yang menghubungkan Sungai Progo dan Sungai Opak”. Dari sinilah Sri Sultan HB IX berlogika dan berandai-andai bagaimana menghubungkan Sungai Progo dengan Sungai Opak, maka Sri Sultan HB IX mendapatkan ide untuk membuat kanal irigasi agar kedua sungai besar tersebut dapat terhubung. Ide ini ditawarkan kepada Jepang dengan dalil demi keberlanjutan Jepang di Yogyakarta. Ide ini menunjukkan ada kesinambungan dari pemikiran Sri Sultan HB VIII ke Sri Sultan HB IX.

Kesinambungan pemikiran dalam wujud pembuatan kanal irigasi untuk kepentingan rakyat. Disinilah terdapat komunikasi berantai dari Sri Sultan HB VIII ke Sri Sultan HB IX, keduanya ada kesamaan memanfaatkan penjajah sebagai media pembangunan di kala itu.

Pembangunan Selokan Mataram merupakan hasil diplomasi Sri Sultan HB IX dengan Yoshiro, hasil diplomasi ini mampu mengurangi penderitaan rakyat dan korban jiwa pada para pekerja Romusha serta memberi manfaat untuk wilayah Yogyakarta, khususnya di bidang pertanian, Panjang Selokan Mataram dimulai dari Bendungan Ancol Bligo hingga Sungai Opak di Kalasan. Upaya pembangunan Selokan Mataram ini sesuai dengan salah satu isi pidato Sri Sultan HB IX tanggal 12 Desember 1941 pukul 18.30 (pidato saat diangkat menjadi Raja), Sri Sultan HB IX berjanji bahwa tahtanya adalah ditujukan untuk kepentingan negara dan rakyatnya, sehingga kepentingan pribadi harus dikalahkan dan mengutamakan kepentingan orang banyak dengan dasar cinta sesama. Sehingga tepatlah jika tujuan pembangunan Selokan Mataram untuk mengairi pertanian seluas 15.734 ha demi kemakmuran rakyat.

Sejarah Lahirnya Selokan Mataram

Kedatangan Jepang di Indonesia pada 1942 mulanya disambut baik oleh rakyat Indonesia, dengan propaganda di mana Jepang mengaku sebagai pemimpin Asia, saudara tua Asia, dan pembebas bangsa-bangsa Asia dari penjajahan bangsa Barat. Seiring berjalannya waktu, sifat asli Jepang terlihat. Mereka mulai memanfaatkan tenaga pribumi untuk Romusha atau kerja paksa. Tenaga rakyat Indonesia diperas untuk memenuhi kebutuhan mereka, utamanya untuk membantu Jepang melawan Sekutu dalam Perang Dunia ke-2.

Melihat kondisi rakyat yang memprihatinkan akibat kebijakan Romusha, Sri Sultan HB IX tidak tinggal diam. Sri Sultan HB IX mencari ide bagaimana agar rakyatnya dapat terhindar dari Romusha dan menggunakan tenaga untuk kepentingan mereka sendiri. Di tengah gencarnya Romusha, Sri Sultan HB IX sebagai raja berusaha menyelamatkan rakyat Yogyakarta dari kekejaman Romusha. Dengan strategi melaporkan kepada Jepang yaitu Jendral Simazu Yoshiro, bahwa Yogyakarta adalah daerah minus dan kering dengan hasil bumi hanya berupa singkong yang diproses menjadi gaplek. Dengan laporan tersebut, Sri Sultan HB IX mengusulkan kepada Jepang agar warganya diperintahkan untuk membangun sebuah selokan saluran air yang menghubungkan Sungai Progo di barat dan Sungai Opak di timur. Dengan demikian lahan pertanian di Yogyakarta yang kebanyakan lahan tadah hujan dapat diairi pada musim kemarau sehingga mampu menghasilkan padi, palawija, sayur dan buah. Hasil pertanian rakyat Yogyakarta dapat memasok kebutuhan pangan bagi tentara Jepang.

Ide atau usulan Sri Sultan HB IX disetujui Jepang dan terbebaslah rakyat Yogyakarta dari Romusha, karena tenaga rakyat Yogyakarta dialihkan untuk membangun saluran air yang sebenarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Ide Sri Sultan HB IX diilhami dari Sunan Kalijaga yang pernah berujar bahwa Yogyakarta bisa makmur jika Sungai Progo dan Sungai Opak disatukan dengan saluran air. Kenyataannya, setelah ada Selokan Mataram warga Yogyakarta lebih Makmur, karena Selokan Mataram mampu mengairi lahan pertanian seluas 15.734 hektar dan sampai saat ini Selokan Mataram masih lestari. Proyek pembangunan saluran irigasi Selokan Mataram merupakan cara Sultan untuk menyelamatkan rakyatnya dari kekejaman Jepang Ketika menerapkan Romusha di Indonesia dari 1942 hingga 1945.

Sejarah membuktikan bahwa Selokan Mataram dibangun atas kerja keras Sri Sultan HB IX dalam berdiplomasi dengan Jepang. Disini tampak kinerja politik Srisultan HB IX berpijak pada sumber daya alam berupa dua sungai yang dikaitkan dengan berpura-pura untuk kepentingan dan keberlanjutan ketersediaan pangan bagi penjajah Jepang. Ternyata sumber daya alam mampu

dijadikan media untuk melawan penjajah dan mendidik rakyat. Dari aspek politik disinilah Jepang tertipu tiga kali, pertama bahwa alibi Sri Sultan HB IX pembangunan Selokan Mataram untuk mengalihkan program Romusha menjadi pemberdayaan masyarakat “membangun untuk kepentingan diri sendiri”, kedua biaya pembangunan Selokan Mataram menjadi tanggungjawab pihak Jepang, ketiga hasil pembangunan Selokan Mataram bukan untuk kepentingan persediaan pangan bagi Jepang tetapi untuk kepentingan pertanian masyarakat Yogyakarta.



Gambar 2: Hulu dari Selokan Mataram

Sumber: data sekunder 2022.

Visi Sri Sultan HB IX “tahta untuk rakyat” diimplementasikan dengan mengutamakan kemakmuran rakyat, perlindungan rakyat dari penjajah dan mencedaskan rakyat melalui berbagai pendidikan dan pemberdayaan. Jadi masyarakat Yogyakarta sangat merasakan hasil perjuangan Sri Sultan HB IX, demikian halnya seluruh rakyat Indonesia yang pernah tinggal di Yogyakarta, tentu tidak asing dengan Selokan Mataram. Saat berlalulalang di kawasan utara DI Yogyakarta seperti daerah kampus Universitas Gadjah Mada di Bulaksumur, Babarsari, Sleman, dan sekitarnya, kita akan menemui aliran sungai yang membelah kawasan tersebut.

Jadi keberadaan Selokan Mataram adalah sebuah anugrah bagi masyarakat Yogyakarta, tetapi sedikit ironis karena banyak sampah yang berserakan di sepanjang aliran Selokan Mataram karena kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan. Bahkan beberapa pengemudi kendaraan bermotor yang sedang lewat melemparkan sampahnya ke saluran ini. Selokan mataram direnovasi 1950 dan 1980 oleh Departemen Pekerjaan Umum memperbaiki talud selokan sepanjang 10 km. Menurut Saputra (2019) Sultan HB IX beserta masyarakat yang dipekerjakan untuk membangun saluran ini adalah pahlawan yang akan selaku dikenang oleh masyarakat khususnya DI Yogyakarta. Tidak mungkin rasanya dua sungai menjadi terhubung sedangkan jarak yang berjauhan pada waktu itu, dimana teknologi tidak secanggih sekarang.

Kenyataannya hal tersebut dapat tercapai, dan manfaat dari Selokan Mataram masih bisa dirasakan sampai saat ini. Kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk merawat dan memanfaatkan Selokan Mataram, karena Selokan Mataram berperan dalam bidang ekonomi pertanian, laboratorium bagi dunia pendidikan dan saat ini sepanjang Selokan mataram dikembangkan menjadi transportasi alternatif, serta akan dikembangkan menjadi wisata tirta. Menurut Pipin Kusumawati, dkk (2019), Selokan Mataram memiliki potensi menjadi destinasi wisata karena dua hal, yaitu nilai historis dengan penduduk Yogyakarta dan memiliki bentang alam yang cukup menarik. Akan tetapi ada tantangan bahwa pemeliharaan Selokan Mataram masih minim dilakukan oleh pemerintah setempat sehingga di beberapa titik Selokan Mataram memperlihatkan beberapa kerusakan, serta terjadi pencemaran air di Selokan Mataram yang berasal dari limbah manusia (Kusumawati et al., 2019).

Strategi Komunikasi Sri Sultan HB IX dengan pihak Jepang

Strategi merupakan suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Artinya Sri Sultan HB IX berusaha bertindak dan bersikap menyesuaikan diri terhadap reaksi ataupun situasi lingkungan yang terjadi, baik itu situasi yang disadari ataupun yang tidak disadari. Dalam hal ini reaksi dan situasi penjajah dan situasi rakyat. Sikap Sri Sultan HB IX yang adaptif sesuai dengan arti kata strategi dari bahasa Yunani dari dua kata, yaitu *strategos* dan *stratego*. *Strategos* sebagai kata benda artinya militer dan memimpin, sedang kata *stratego* sebagai kata kerja artinya merencanakan.

Menurut penulis tujuan Sri Sultan HB IX membuat strategi antara lain: menjaga kepentingan yang sangat luas untuk banyak pihak, memperbaharui strategi lama pada masa penjajahan Belanda dan mempersiapkan perubahan. Disinilah tampak kepemimpinan Sri Sultan HB IX sangat efektif dan efisien, tampak inovasi untuk mencapai tujuan masa depan karena selalu dievaluasi dalam setiap tahap. Dalam pembuatan kanal irigasi Selokan Mataram Sri Sultan HB IX melakukan berbagai strategi komunikasi, antara lain:

Strategi berkelanjutan

Sri Sultan HB IX dalam berinovasi gagasan Selokan Mataram diilhami dari pemikiran Sunan Kalijaga (Susuhunan Kalijaga) dan ayahda Sri Sultan HB VIII. Ilham dari Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Walisongo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya dalam berkomunikasi sehingga memiliki pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa.

Inspirasi dari Sri Sultan HB VIII, karena Sri Sultan HB IX menghargai karya-karya Sri Sultan HB VIII yang pada tahun 1904 telah merintis kanal irigasi untuk kepentingan rakyat. Pada waktu itu Sri Sultan HB VIII bekerjasama dengan Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1909 membangun kanal atau saluran pengairan yang dikenal dengan selokan *Van Der Wijck* dan Bendungan Karang Talun. Saluran dan bendungan dipergunakan untuk pengairan area pertanian, khususnya perkebunan tebu untuk beberapa wilayah di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, sebab di sekitar Kasultanan Yogyakarta telah dibangun 17 pabrik gula. Pada tahun 1944 kanal saluran pengairan karya Sultan HB VIII dilanjutkan oleh Sri Sultan HB IX dengan pembangunan Selokan Mataram sepanjang 30,8 km. Disamping melanjutkan karya Sri Sultan HB VIII pembangunan Selokan Mataram menjadi strategi penyelamatan rakyat, melindungi rakyat dan mensejahterakan rakyat serta melatih kemandirian rakyat.

Strategi politik

Sri Sultan HB IX dengan nama GRM. Dorodjatun dinobatkan sebagai Sri Sultan HB IX pada 18 Maret 1940. Strategi politik bernegosiasi dengan Gubernur Yogyakarta Lucien Adam sebagai perwakilan Pemerintah Hindia Belanda. Keberanian Sri Sultan HB IX mengubah sistem perbelanjaan di kraton dengan cepat, bahkan terjadi reformasi besar-besaran di kraton dalam hal tingkat kekuasaan kepada rakyatnya, pembagian antara kekayaan keraton dan kesultanan yang lebih jelas, dan pengaturan pembayaran gaji kepada anggota keluarganya, dll (Monfries, 2018). Setelah empat bulan berunding dengan alot, Dorodjatun tiba-tiba menyetujui kontrak politik tersebut secara langsung tanpa adanya penolakan atas isi-isinya sebagaimana yang telah disampaikan dalam perundingan-perundingan sebelumnya. GRM. Dorodjatun mengaku melakukannya setelah mendapatkan *wisik* (bisikan) dari almarhum ayahnya yang mendatanginya dalam mimpi (Roem, 2011).

Dalam konteks ini Sri Sultan HB IX melakukan komunikasi intrapersonal dan seolah mendapat jawab dari ayahdanya Sri Sultan HB VIII yang mengatakan “*wis, Thole, Tekena wae, Landa bakal lunga saka bumi kene*, artinya Sudahlah, Nak, tanda tangani saja. Belanda akan pergi dari bumi sini” (Mochtar, 1982). Sultan Hamengkubuwana IX diberi otonomi untuk menjalankan pemerintahan di daerahnya di bawah Pemerintah Kolonial Jepang

Strategi menekan

Pembangunan Selokan Mataram merupakan hasil diplomasi Sri Sultan HB IX dengan Yoshiro, hasil diplomasi Sri Sultan HB IX mampu mengurangi penderitaan dan korban jiwa pada para pekerja romusha dan memberi manfaat untuk wilayah Yogyakarta, khususnya di bidang pertanian Selokan Mataram dimulai dari Bendungan Ancol Bligo hingga sungai Opak di Kalasan (<https://jogiacagar.jogjaprovo.go.id>). Tujuan dibangun SelokanMataramkan Mataram untuk mengairi pertanian seluas 15.734 ha. Selokan mataram direnovasi 1950 dan 1980 oleh Departemen Pekerjaan Umum memperbaiki talud selokan sepanjang 10 km. Disinilah tampak keberanian Sri Sultan HB IX menekan kepada pihak Jepang, tetapi tidak kelihatan karena alasan kepentingan irigasi untuk memenuhi kebutuhan cadangan pangan Jepang.

Strategi “mengekor”

Sri Sultan HB IX secara teknik mengikuti apa yang diinginkan pihak Jepang, tetapi secara prinsip mengedepankan tahta untuk rakyat. Selama berunding dengan Jepang Sri Sultan HB IX mengekor untuk mengadaptasikan pemerintahannya dengan militer Jepang dengan tujuan membuat atmosfer pendudukan di Yogyakarta terasa lebih damai, serta melakukan beberapa reformasi di Kesultanan dengan mengganti nama-nama lembaga pemerintahan daerah yang sebelumnya berbahasa Belanda menjadi berbahasa Jawa. Menghapus distrik diganti menjadi kapanewon (kecamatan), serta membuat layanan publik dapat diakses dari kelas dan kelompok masyarakat (Suwarno, 1993).

Strategi Kerjasama

Mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan Selokan Mataram Sri Sultan HB IX selalu bekerjasama dengan militer Jepang, pemerintah colonial, sehingga pemerintah colonial sampai membantu pendanaan pembangunannya seban yak satu juta gulden (Gottschlak, 2008). Kerjasama ini juga dilakukan dengan para panewu dan rakyat. Kehebatan Sri Sultan HB IX dalam melakukan kerjasam tidak ada kesan membenani, menekan dan egois, semua dilakukan dengan perencanaan yang matang dan tidak tergesa-gesa.

Prinsip kerjasama yang diterapkan Sri Sultan HB IX selalu menghormati harkat dan martabat manusia, menjaga kerahasia masing-masing pihak, mengutamakan keadilan dan memperhitungkan manfaat serta memperhitungkan kerugian yang timbul akibat kerjasama tersebut.

Komunikasi pemberdayaan dibalik Selokan Mataram

Komunikasi pemberdayaan, komunikasi sebagai sumber daya yang mampu membuat terjadinya perubahan sosial hingga meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pesan program maupun produk yang ditawarkan. Disinilah bukti bahwa komunikasi sebagai sumberdaya dan kedudukan sumber daya komunikasi sejajar dengan sumber daya pembangunan lainnya (Akbar et al., 2026). Terkait dengan pembangunan Selokan Mataram Sri Sultan HB IX telah mampu menjalankan komunikasi yang rumit dengan efisien, dan mewujudkan komunikasi sebagai proyek infrastruktur yang efektif yang mendapat dukungan komunikan (Penjajah Jepang) sehingga dapat untuk memajukan peradaban manusia.

Taktik komunikasi Sri Sultan HB IX sesuai dengan hasil studi Cangara (2013:41), tentang perencanaan komunikasi untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada guna mencapai efektivitas komunikasi. Dari sisi kegunaan dan fungsi perencanaan komunikasi untuk mengimplementasikan program-program yang ingin dicapai terutama kegiatan perlindungan rakyat, kesejahteraan rakyat dan program pemberdayaan masyarakat.

Komunikasi pemberdayaan (*empowerment communication*) adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kesadaran, dan kemandirian suatu kelompok masyarakat untuk mencapai perubahan sosial (Servaes, 2008). Dalam konteks pembangunan, komunikasi idealnya tidak bersifat instruksional searah (*top-down*), melainkan berorientasi pada penyadaran dan partisipasi masyarakat bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya sendiri (Nasution, 2002).

Aspek utama dalam komunikasi pemberdayaan meliputi: a) advokasi, menegosiasikan kepentingan masyarakat lemah kepada pihak pemegang kekuasaan secara persuasif; b) mobilisasi sosial (*social mobilization*), menggerakkan massa bukan melalui koersi (*paksaan*), melainkan melalui pemahaman akan tujuan bersama (Nasution, 2002); dan c) pembingkaihan makna (*framing*), mengubah narasi dari satu persepsi, seperti "pekerjaan paksa" menjadi persepsi lain, seperti "investasi kesejahteraan". yang lebih dapat diterima oleh sasaran komunikasi (Mulyana, 2007)

Mengacu pada sejarah pembuatan selokan Mataram dapat ditemukan dan dipetakan beberapa komunikasi pemberdayaan sebagai berikut:

1. Sri Sultan HB IX mendidik penjajah Jepang

Fungsi komunikasi integrasi, komunikasi menciptakan integrasi, artinya komunikasi mampu menjembatani perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di dalam masyarakat. Mendidik kelompok kolonial dan militer Jepang untuk memahami akan kebutuhan pihak kolonial dan kebutuhan militer Jepang.

2. Sri Sultan HB IX mendidik penjajah dan mendidik rakyat

Fungsi komunikasi inovasi, bahwa komunikasi juga mendorong lahirnya inovasi. Dalam hal ini inovasi hadir karena adanya kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat terkait potensi yang dimiliki. Dalam hal ini Sri Sultan HB IX melihat bahwa di wilayah Mataram ada potensi sungai yang cukup besar yaitu Sungai Progo di bagian barat dan Sungai Opak di bagian timur, sedang diantara kedua sungai terdapat hamparan sawah yang tandus karena tidak ada irigasi yang melalui di hamparan sawah tersebut. Disinilah lahir ide "bagaimana program romusha" penjajah untuk dialihkan yang bermanfaat jangka panjang bagi rakyatnya.

3. Sri Sultan HB IX memindah kekuasaan

Secara tidak langsung hadirnya Selokan Mataram memindah kekuasaan masyarakat petani yang sebelumnya tidak ada selokan tanah pertanian hanya ditanami singkong dan menunggu air hujan, tetapi dengan hadirnya Selokan Mataram pertanian padi dan pertanian lain dapat dilakukan sepanjang waktu termasuk hadir berbagai kolam ikan. Keberhasilan komunikasi pemberdayaan ini terbukti hingga era modern. Berbeda dengan banyak proyek infrastruktur masa penjajahan yang hancur atau ditinggalkan, Selokan Mataram hingga kini masih mengairi ribuan hektare sawah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta dan telah berstatus sebagai cagar budaya (Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 231/KEP/2021).

Rakyat terus merawatnya karena memori kolektif yang ditanamkan oleh Sultan HB IX pada masa lalu, bahwa selokan tersebut adalah urat nadi kehidupan ekologis mereka, bukan sekadar instrumen penjajahan. Bahkan sampai saat ini masih dan terus berfungsi serta akan dikembangkan kearah wisata tirta.

Proses mendidik penjajah, mendidik rakyat dan memindahkan kekuasaan Sri Sultan HB IX secara langsung telah menggunakan tiga strategi pemberdayaan. Ketiga strategi tersebut antara lain:

Strategi profesional

Aktivitas intelektual Sri Sultan HB IX tampak dalam negosiasi dengan penjajah Jepang, negosiasi dilakukan secara formal maupun non formal. Dalam hal ini Sri Sultan sebagai raja yang mempunyai kewajiban melindungi rakyat dijalankan penuh tanggungjawab agar rakyatnya tidak dihisap tenaganya oleh pihak penjajah. Dalam proses pembangunan kanal irigasi Selokan Mataram Sri Sultan HB IX melakukan pendampingan secara maksimal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Proses pendampingan penuh dengan set norma sesuai dengan peran, tugas, kewajiban dan tanggungjawab (Schein, 2010)

Strategi *derec-action*

Strategi *derec-action* merupakan dominasi kepentingan yang dihormati pihak yang terlibat. Dalam hal ini usulan atau ide Sri Sultan HB IX kepada pihak Jepang dalam program Romosha digantikan dengan membuat canal irigasi disetujui pihak Jepang, artinya ide Sri Sultan HB IX mendapat penghormatan. Demikian halnya rakyat semuanya tunduk dan patuh atas ide pembuatan kacal irigasi, bagi rakyat kusunya petani program pembuatan kanal irigasi memberi mamfaat jangka Panjang bagi petani.

Strategi transformatif

Strategi transformatif bersifat berubah-ubah menyesuaikan dengan keadaan, sifat dan kebijakan yang ditandai dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan untuk masa jangka panjang kususnya untuk rakyat Yogyakarta. Menurut R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, tujuan sentral strategi komunikasi ada tiga, yaitu: *to secure understanding*, *to establish acceptance*, dan *to motivate action*. *To secure understanding*, merupakan kegiatan untuk memahami dan memastikan bahwa komunikan paham dan bersedia penerima pesan karena mengerti dengan pesan yang diterimanya (Pace et al., 1979). Ketika komunikan telah mengerti dan menerima, penerimanya itu harus dibina *to establish acceptance*, dalam hal ini Sri Sultan HB IX terus menerus membangun komunikasi dengan pihak Jepang, sehingga pada akhirnya Jepang dengan jiwa besar melaksanakan program pembangunan Selokan Matram dengan serius. Bersamaan melakukan *to secure understanding* dan *to establish acceptance* Sri Sultan HB IX melakukan tindakan motivasi (*to motivate action*) kepada rakyat agar dengan semangat dan tanggungjawab rakyat menjalankann program pembangunan Selokan Mataram.

Dampak Komunikasi Pemberdayaan

a. Bagi Masyarakat

Jumlah rakyat yang menjadi korban Romusha menjadi berkurang, dengan adanya Selokan Mataram tingkat produktivitas pertanian meningkat sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada bagian lain, keberadaan Selokan Van Der Wijk yang merupakan peninggalan Belanda menjadi bagian dari sistem pengairan yang terhubung dengan Selokan Mataram. Dalam konteks tersebut menunjukan kehandalan Sultan mengkomunikasikan keberadaan infrastruktur yang ada (Selokan Van Der Wijk) untuk kepentingan pemberdayaan. Kehandalan dalam hal komunikasi juga dibuktikan oleh Sri Sultan HB IX dengan diberikannya kebebasan untuk mengubah pasal-pasal perjanjian dengan Belanda yang masih berlaku di masa penjajahan Jepang (Iswantoro, 2020).

b. Bagi Penjajah

Hadirnya Selokan Mataram, membarikan dampak terhadap meningkatnya produksi hasil pertanian tanpa menunggu musim hujan, sehingga petani di DIY semakin berdaya yang memberikan

peningkatan signifikan terhadap tingkat pendapatan petani, secara otomatis pasokan bahan pangan kepada pihak penjajah juga meningkat, sehingga cadangan pangan kaum penjajah tersedia cukup baik (Sulistya et al., 2009)

c. Menambah nilai jual tanah di wilayah Sleman dan Magelang

Nilai jual wilayah Sleman dan Magelang dirasakan masyarakat dan pemerintah tidak pada saat penjajahan Jepang berlangsung, tetapi pasca penjajahan dan sampai saat ini Sleman dan Magelang memiliki potensi pertanian yang cukup baik, salah satu faktor pertanian baik karena kecukupan kebutuhan air untuk keperluan pertanian. Walaupun dukungan lain juga berpengaruh.

d. Memperkuat *trust* Sultan HB IX

Kemampuan HB IX berkomunikasi dan bernegosiasi dengan penjajah Jepang mempertemukan kepentingan Jepang dan kepentingan rakyat. Jepang menerima usulan pembangunan irigasi dan terbukti meningkatkan hasil pertanian yang mendukung kepentingan logistik penjajah, dan tidak terjadi kerja paksa. menjadikan hubungan kerja sama semakin terbentuk, ruang kewenangan Sultan dalam pemerintahan Yogyakarta tetap/semakin terbuka. Sultan dapat menggunakan ruang tersebut untuk kepentingan rakyat. Sri Sultan HB IX diberi otonomi untuk menjalankan pemerintahan di daerahnya di bawah Pemerintah Kolonial Jepang. Dibuktikan dengan jabatan *Pepatih Dalem* yang sebelumnya harus bertanggung jawab kepada Sultan dan Pemerintah Kolonial Belanda, kini hanya bertanggung jawab kepada Sultan saja (Roem, 2011). Pada tanggal 1 Agustus 1942, Panglima Besar Tentara Pendudukan Jepang di Jakarta menjadikan Yogyakarta sebagai wilayah *Kooti* (daerah istimewa) dan menetapkan Sri Sultan Hamengkubowono IX sebagai penguasa wilayah.

Dari hal-hal yang telah dilakukan Sri Sultan HB IX sesuai pendapat Everatt M. Rogers (1995) komunikasi sebagai sebuah proses ketika suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka (Rogers, 1995). Khususnya pada pihak Jepang menerima ide tentang pembangunan Selokan Mataram dan masyarakat bersedia bekerja membangun aliran selokan mataram. Disini terjadi perubahan perilaku dari keterlibatan pelaku komunikasi. Dalam proses pembangunan Selokan Mataram Sri Sultan HB IX melakukan kontrol dan motivasi secara terus menerus baik kepada pihak Jepang maupun kepada rakyat agar semangat dalam bekerja. Sikap Sri Sultan HB IX yang demikian relevan dengan pendapat Lazarfeld and Hoveland, melihat komunikasi sebagai kontrol sosial dan stimuli-respons (Lazarsfeld et al., 1968).

PENUTUP

Proses pembangunan yang terjadi, bukanlah sesuatu yang sifatnya alami atau “*given*”, melainkan suatu proses yang dilaksanakan secara sadar dan terencana. Pembangunan Selokan Mataram yang diskenario Sri Sultan HB IX dilaksanakan melalui proses perencanaan yang sangat hebat, sebab tidak sekedar perencanaan pembangunan fisik tetapi lebih pada proses perencanaan politik dalam menghadapi penjajah dan terbukti penjajah mampu ditaklukan.

Pembangunan Selokan Mataram merupakan perubahan yang menyeluruh yang mencakup politik perang, politik ekonomi pertanian, dan tatanan kehidupan masyarakat, sehingga pembangunan Selokan Mataram dapat disebut sebagai *eco development* yang tidak hanya berupa perubahan-perubahan ekonomi. Pembangunan Selokan Mataram juga mencakup *dehumanisasi* kultural dan perubahan mentalitas masyarakat dalam suatu struktur sosial-politik tertentu. Dengan demikian, pembangunan Selokan Mataram bukanlah semata-mata politik dan ekonomi, melainkan juga mencakup aspek non materiil seperti penentuan nasib sendiri, swadaya, kemerdekaan, partisipasi. dikerjakan dari, oleh, dan untuk masyarakat, dan ujung pembangunan Selokan Mataram

untuk memperbaiki mutu kehidupan setiap individu dan masyarakatnya, dan tidak mengorbankan masyarakat melainkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses pembangunan Selokan Mataram sebagai bukti pentingnya komunikasi dalam setiap pengambilan keputusan bagi pemimpin, sehingga komunikasi dalam proses persiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan dapat dipetakan menjadi tiga hal, yaitu, memaknai dan menempatkan pentingnya komunikasi, strategi komunikasi dan komunikasi pemberdayaan. Kehadiran Selokan Mataram dapat dipandang sebagai salah satu bukti keberhasilan komunikasi politik Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan pemerintah pendudukan Jepang. Keberhasilan tersebut tidak hanya menghasilkan pembangunan infrastruktur irigasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Sultan mampu membangun posisi tawar dan memperoleh ruang kepercayaan dari pemerintah Jepang. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang efektif dapat memberikan dampak yang menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aubrey Fisher. 1986. *Teori- Teori Komunikasi*, Rosda Karya: Bandung.
- Akbar, M. F., Kom, S. I., MM, D. E. K. W., Sos, S., Dyah Gandasari, S. P., MM, D. P. I. N., SP, M. S., & Elly Susanti, S. P. (2026). *Manajemen Komunikasi Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Dan Kearifan Lokal*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.
- Anggratyas, P. A. R. (2025). Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Perkotaan Berbasis Situs Warisan Budaya Di Kota Mataram. *Journal Of Responsible Tourism*, 5(1), 637–652.
- Apid, H. F. (2008). *Romusa: Sejarah Yang Terlupakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Bibliography Armando Cortesao, tr, The Suma Oriental of Tome Pires, London, 1944, Reprinted in 1967;
- Febi Nurul Safitri. (2022). *Selokan Mataram, Kanal Irigasi Peninggalan Sultan Hamengkubuwono IX*. Kompas.com - 31/03/2022, 09:00 WIB. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/31/0900000079/selokan-mataram-kanal-irigasi-peninggalan-sultan-hamengkubuwono-ix>
- Fuaidah, T. (2009). *Analisis Kisah-Kisah Interaksi Idukatif dalam Perspektif Al-Qur'an*. Surabaya: Tesis Universitas Negeri Islam Sunan Ampel.
- Fisher, B. A., Rakhmat, J., & Trimio, S. (1986). *Teori-teori komunikasi: Perspektif mekanistik, Psikologis, interaksional dan pragmatis*. Penerbit Remadja Karya CV Bandung.
- Gottschlak, L. (2008). *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Iswantoro, I. (2020). Peranan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam Menegakkan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 158–181.
- Kurasawa, A. (1993). *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa, 1942-1945*. Diterbitkan atas kerja sama Yayasan Karti Sarana dengan Gramedia.
- Kusumawati, P., Rif'an, A. A., & Sugiarto, E. (2019). Potensi Selokan Mataram: ulasan keadaan fisik dan kualitas airnya. *Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori, Dan Praktik Dalam Bidang Pendidikan Dan Ilmu Geografi*, 24(2), 108–118.
- La Patilaya, H., Sinurat, J., Sarasati, B., Jumiayati, S., Supriatna, A., Harto, B., Siburian, U. D., Mahaza, M., Maesarini, I. W., & Hapsari, T. D. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat*.
- Lazarsfeld, P. F., Berelson, B., & Gaudet, H. (1968). *The people's choice: How the voter makes up his*

- mind in a presidential campaign*. Columbia University Press.
- Mochtar, K. (1982). *Pak Sultan dari masa ke masa*. Dalam Mohammad Roem, Dkk. *Tahta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Gramedia.
- Monfries, J. (2018). *Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX Dari Yogyakarta: Raja Di Negara Republik*. Yogyakarta: Biography.
- Mulyana, D. (2007). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Nasution, Z. (2002). *Komunikasi pembangunan: Pengenalan teori dan Penerapannya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Pace, R. W., Peterson, B. D., & Burnett, M. (1979). *Techniques for effective communication*. (No Title).
- Ratmanto, A. (2012). *Mengawal Transisi, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Pemerintahan Transisi Republik Indonesia di Yogyakarta [Beginning the Transition, Sultan Hamengku Buwono IX and the Transitional Government of the Republic of Indonesia]*. Yogyakarta: Atap Buku and Mata Padi Presindo.
- Roem, M. (2011). *Takhta untuk rakyat: celah-celah kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rogers, E. M. (1995). *Diffusion of Inovations*, Edition of the Free Press. The Fourth.
- Schein, E. H. (2010). *Three cultures of management: The key to organizational learning. Glocal Working. Living and Working Across the World With Cultural Intelligence*. Milan, Italy, Franco Angeli, 37–58.
- Selokan Mataram, jogja cagar. <https://jogjacagar.jogjaprovo.go.id>
- Servaes, J. (2008). *Communication for Development and Social Change*. New Delhi.
- Suhartono, W. P. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sulistya, V. A., Harnoko, D., Budiharto, H., Setyaningsih, A., & Ridlo, M. R. (2009). *Laporan hasil pengkajian koleksi diorama pembuatan Selokan Mataram*. Museum Benteng Vredeborg Yogyakarta.
- Suwarno, P. Y. (1993). *Hamengkubuwono IX dan sistem birokrasi pemerintahan Yogyakarta 1942-1974:: Sebuah tinjauan historis*. Universitas Gadjah Mada.
- Zed, M. (2025). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.